



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**(BAPPEDA)**

Jl. Alun-Alun Utara No 7 Telepon (0334) 883516 Fax. (0334) 890354  
email : [bappeda@lumajangkab.go.id](mailto:bappeda@lumajangkab.go.id) dan [lumajangbappeda@gmail.com](mailto:lumajangbappeda@gmail.com)

LUMAJANG - 67316

Lumajang, 24 Maret 2023

Kepada

Yth. Inspektur Daerah

Di-

LUMAJANG

Nomor : 700/1195/427.71/2023  
Sifat : Amat Segera  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : Jawaban Atas Pembahasan  
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan  
Inspektorat Daerah Kabupaten  
Lumajang

Menindaklanjuti Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektur Daerah Kabupaten Lumajang nomor : 700/1838/427.3/2022 tanggal 29 Juli 2022, bersama ini kami sampaikan Jawaban Atas Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektur Daerah Kabupaten Lumajang pada BAPPEDA Kabupaten Lumajang sebagaimana terlampir.

Demikian, terima kasih atas perhatiannya.

KEPALA BAPPEDA



RETNO WULAN ANDARI, M.Si.

NIP 19670325 199312 2 001

**JAWABAN ATAS PEMBAHASAN TINDAK LANJUT  
HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN LUMAJANG  
PADA BAPPEDA KABUPATEN LUMAJANG**

NO	TEMUAN	JAWABAN	KETERANGAN										
1	2	5	6										
I	SEKRETARIAT												
1	<p style="text-align: center;"><b>REKAPITULASI TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN</b></p> <p style="text-align: center;">Periode Pelaporan Tindaklanjut : 01 January 2021 &amp; 29 July 2022</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Nomor LHP &amp; Tanggal</th> <th style="width: 25%;">Temuan</th> <th style="width: 15%;">Kode Rekomendasi</th> <th style="width: 15%;">Kode Tindaklanjut</th> <th style="width: 10%;">Kode Status Kel.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>700/22-027.3/2021 28 April 2021 LHE Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ✓</td> <td> <p>Terdapat beberapa kelemahan dalam perencanaan diantaranya : 1) Target kinerja yang diharapkan belum sepenuhnya digunakan untuk mengukur keberhasilan, 2) Rencana Aksi atas kinerja belum sepenuhnya ditinjau pencapaiannya secara berkala, 3) Rencana Aksi atas kinerja belum sepenuhnya ditinjau dalam pengarah dan pengorganisasian kegiatan.</p> </td> <td style="text-align: center;">2.03</td> <td style="text-align: center;">- 0</td> <td style="text-align: center;">10 BT</td> </tr> </tbody> </table>	Nomor LHP & Tanggal	Temuan	Kode Rekomendasi	Kode Tindaklanjut	Kode Status Kel.	700/22-027.3/2021 28 April 2021 LHE Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ✓	<p>Terdapat beberapa kelemahan dalam perencanaan diantaranya : 1) Target kinerja yang diharapkan belum sepenuhnya digunakan untuk mengukur keberhasilan, 2) Rencana Aksi atas kinerja belum sepenuhnya ditinjau pencapaiannya secara berkala, 3) Rencana Aksi atas kinerja belum sepenuhnya ditinjau dalam pengarah dan pengorganisasian kegiatan.</p>	2.03	- 0	10 BT	<p>Rekomendasi kami perhatikan, akan kami lakukan di Tahun 2023.</p>	
Nomor LHP & Tanggal	Temuan	Kode Rekomendasi	Kode Tindaklanjut	Kode Status Kel.									
700/22-027.3/2021 28 April 2021 LHE Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ✓	<p>Terdapat beberapa kelemahan dalam perencanaan diantaranya : 1) Target kinerja yang diharapkan belum sepenuhnya digunakan untuk mengukur keberhasilan, 2) Rencana Aksi atas kinerja belum sepenuhnya ditinjau pencapaiannya secara berkala, 3) Rencana Aksi atas kinerja belum sepenuhnya ditinjau dalam pengarah dan pengorganisasian kegiatan.</p>	2.03	- 0	10 BT									
2	<p>Terdapat beberapa kelemahan dalam Pengukuran Kinerja diantaranya : 1) Pengukuran kinerja belum sepenuhnya dilakukan secara berjangka, 2) Pengumpulan data kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan, 3) Pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi, 4) KPI belum sepenuhnya ditinjau dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, 5) KPI belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk penilaian kinerja, 6) Target kinerja eselon III dan IV belum sepenuhnya ditinjau pencapaiannya, 7) Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari seluruh eselon IV kurang belum sepenuhnya ditinjau dengan ditinjau sebagai dasar pemberian reward and punishment, 8) KPI belum sepenuhnya direvisi secara berkala, 9) Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi belum sepenuhnya digunakan untuk peninjauan dan peninjauan kinerja secara berkala.</p>	1.04	- 0	10 BT									

Rekomendasi kami perhatikan, akan kami lakukan di Tahun 2023.

<p>3</p>	<p>Rekomendasi kami perhatikan, akan kami lakukan di Tahun 2023.</p>	<p>2.03</p> <p>c. Terkait Pelaporan Kinerja agar : 1) Meningkatkan penyajian esensial dan analisis mengenai capaian kinerja dalam Laporan Kinerja. 2) Menyempurnakan penyajian pendampingan data kinerja yang memadai antara masalah tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan pembantingian lain yang diperlukan dalam Laporan Kinerja. 3) Meningkatkan penyajian informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam Laporan Kinerja. 4) Meningkatkan penyajian informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi dalam Laporan Kinerja. 5) Meningkatkan kesediaan informasi kinerja dalam Laporan Kinerja. 6) Meningkatkan penggunaan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja untuk perbaikan perencanaan. 7) Meningkatkan penggunaan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi. 8) Meningkatkan penggunaan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja untuk peningkatan kinerja. 9) Meningkatkan penggunaan - (0) <b>Uj untuk postifia kinerja.</b></p>	<p>Rekomendasi kami perhatikan, akan kami lakukan di Tahun 2023.</p>
<p>4</p>	<p>2.03</p> <p>Terhadap beberapa kelemahan dalam Evaluasi Internal diantaranya : 1) Evaluasi program belum sepenuhnya dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program. 2) Evaluasi program belum sepenuhnya memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan. 3) Evaluasi program belum sepenuhnya memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan. 4) Perencanaan Rencana Aksi belum sepenuhnya dilaksanakan dalam rangka mengidentifikasi kinerja. 5) Perencanaan Rencana Aksi belum sepenuhnya memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan. 6) Hasil evaluasi Rencana Aksi belum sepenuhnya menunjukkan perubahan setiap periode. 7) Hasil evaluasi program belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang. 8) Hasil evaluasi Rencana Aksi belum sepenuhnya ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.</p>	<p>4. Terkait Evaluasi Internal agar: 1) Meningkatkan pelaksanaan evaluasi program dalam rangka menilai keberhasilan program. 2) Meningkatkan pemberian rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan dalam evaluasi program. 3) Meningkatkan pemberian rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan dalam evaluasi program. 4) Meningkatkan pelaksanaan Perencanaan Rencana Aksi dalam rangka meningkatkan kinerja. 5) Meningkatkan pemberian alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan dalam pemantauan Rencana Aksi. 6) Meningkatkan hasil evaluasi Rencana Aksi agar menunjukkan perubahan setiap periode. 7) Meningkatkan pelaksanaan program di masa yang akan datang. 8) Meningkatkan tindak lanjut hasil evaluasi Rencana Aksi dalam bentuk langkah-langkah nyata. - (0)</p>	

<p>5</p>	<p>Rekomendasi kami perhatikan, akan kami lakukan di Tahun 2023.</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="183 1613 375 1737"> <p>1.01</p> </td> <td data-bbox="183 1737 375 1860"> <p>a. Terkait Pencapaian Kinerja agar: 1) Menampilkan capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai pembendahkiran laporan kinerja. 2) Menyampaikan informasi mengenai kinerja secara akurat. 3) Menampilkan analisis capaian kinerja secara mendalam. - (0)</p> </td> <td data-bbox="183 1860 375 1983"> <p>- 0</p> </td> <td data-bbox="183 1983 375 2106"> <p>06</p> </td> <td data-bbox="183 2106 375 2229"> <p>8T</p> </td> </tr> </table>	<p>1.01</p>	<p>a. Terkait Pencapaian Kinerja agar: 1) Menampilkan capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai pembendahkiran laporan kinerja. 2) Menyampaikan informasi mengenai kinerja secara akurat. 3) Menampilkan analisis capaian kinerja secara mendalam. - (0)</p>	<p>- 0</p>	<p>06</p>	<p>8T</p>			
<p>1.01</p>	<p>a. Terkait Pencapaian Kinerja agar: 1) Menampilkan capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai pembendahkiran laporan kinerja. 2) Menyampaikan informasi mengenai kinerja secara akurat. 3) Menampilkan analisis capaian kinerja secara mendalam. - (0)</p>	<p>- 0</p>	<p>06</p>	<p>8T</p>						
<p>II</p>	<p>BIDANG RENDALEV</p>	<p>1</p>								
<p>1</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="550 874 774 1022"> <p>700/148/427.3/2021 24 November 2021 Badan Perencanaan Perimbangan Daerah</p> </td> <td data-bbox="550 1022 774 1170"> <p>Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Penyusunan Peraturan RPJMD</p> </td> <td data-bbox="550 1170 774 1318"> <p>3.01</p> </td> <td data-bbox="550 1318 774 1466"> <p>Tinjauan Penyusunan RPJMD Kabupaten Luwu tahun 2023 - 07 2023 agar : meningkatkan proses pengendalian internal Pemerintah penyusunan peraturan RPJMD dengan menyusun SOP penyusunan RPJMD Kabupaten secara menyeluruh dan diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku termasuk penggunaan sistem informasi, menyusun kertas kerja sebagai bukti pembuang pelaksanaan pengendalian</p> </td> <td data-bbox="550 1466 774 1613"> <p>PTL 3 Desember 2021 ditandatangani dengan telah diakukan upaya agresi kerja sebagai</p> </td> <td data-bbox="550 1613 774 1761"> <p>06</p> </td> <td data-bbox="550 1761 774 1909"> <p>T5</p> </td> <td data-bbox="550 1909 774 2057"> <p>SOP belum diaplikasikan</p> </td> </tr> </table>	<p>700/148/427.3/2021 24 November 2021 Badan Perencanaan Perimbangan Daerah</p>	<p>Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Penyusunan Peraturan RPJMD</p>	<p>3.01</p>	<p>Tinjauan Penyusunan RPJMD Kabupaten Luwu tahun 2023 - 07 2023 agar : meningkatkan proses pengendalian internal Pemerintah penyusunan peraturan RPJMD dengan menyusun SOP penyusunan RPJMD Kabupaten secara menyeluruh dan diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku termasuk penggunaan sistem informasi, menyusun kertas kerja sebagai bukti pembuang pelaksanaan pengendalian</p>	<p>PTL 3 Desember 2021 ditandatangani dengan telah diakukan upaya agresi kerja sebagai</p>	<p>06</p>	<p>T5</p>	<p>SOP belum diaplikasikan</p>	<p>Rekomendasi kami perhatikan, kami lampirkan SOP RPJMD.</p> <p>Lampiran 1: SOP RPJMD.</p>
<p>700/148/427.3/2021 24 November 2021 Badan Perencanaan Perimbangan Daerah</p>	<p>Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Penyusunan Peraturan RPJMD</p>	<p>3.01</p>	<p>Tinjauan Penyusunan RPJMD Kabupaten Luwu tahun 2023 - 07 2023 agar : meningkatkan proses pengendalian internal Pemerintah penyusunan peraturan RPJMD dengan menyusun SOP penyusunan RPJMD Kabupaten secara menyeluruh dan diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku termasuk penggunaan sistem informasi, menyusun kertas kerja sebagai bukti pembuang pelaksanaan pengendalian</p>	<p>PTL 3 Desember 2021 ditandatangani dengan telah diakukan upaya agresi kerja sebagai</p>	<p>06</p>	<p>T5</p>	<p>SOP belum diaplikasikan</p>			
<p>2</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1093 874 1316 1022"> <p>PTL 3 Desember 2021 ditandatangani dengan Penyusunan P- RPJMD telah mengikuti ketentuan yang diatur/dibakukan dengan Bappda Provinsi Jawa Tengah - (4)</p> </td> <td data-bbox="1093 1022 1316 1170"> <p>06</p> </td> <td data-bbox="1093 1170 1316 1318"> <p>T5</p> </td> <td data-bbox="1093 1318 1316 1466"> <p>Jadwal telah diaplikasikan namun setiap tahun belum diikuti bukti secara mendetail</p> </td> </tr> </table>	<p>PTL 3 Desember 2021 ditandatangani dengan Penyusunan P- RPJMD telah mengikuti ketentuan yang diatur/dibakukan dengan Bappda Provinsi Jawa Tengah - (4)</p>	<p>06</p>	<p>T5</p>	<p>Jadwal telah diaplikasikan namun setiap tahun belum diikuti bukti secara mendetail</p>	<p>Rekomendasi kami perhatikan.</p>				
<p>PTL 3 Desember 2021 ditandatangani dengan Penyusunan P- RPJMD telah mengikuti ketentuan yang diatur/dibakukan dengan Bappda Provinsi Jawa Tengah - (4)</p>	<p>06</p>	<p>T5</p>	<p>Jadwal telah diaplikasikan namun setiap tahun belum diikuti bukti secara mendetail</p>							

3

Rekomendasi kami perhatikan.

PTL 3	Desember 2021 ditandatangani dengan Rancangan P. RP-JMD diuraikan dengan sistem 06	TS	bukti belum ditampirkan
Informasi Pemerintah Daerah (IPD) sesuai amanat Permenadagri nomor 70 Tahun 2019 - (4)			

4

Rekomendasi kami perhatikan.

PTL 3	Desember 2021 ditandatangani dengan	09	TS
Keterhabisan dan kesesupan tersebut dijabarkan dengan laporan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Lumajang tahun 2018-2023 - (4)			

5	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="183 948 566 1268"> <p>PTL 3 Desember 2021 ditindaklanjuti dengan akan diperhatikan dalam penyusunan dokumen perencanaan selanjutnya. (1)</p> </td> <td data-bbox="183 1071 566 1145">09</td> <td data-bbox="183 1145 566 1219">TS</td> <td data-bbox="183 1219 566 2303"> <p>belum dilengkapi surat pernyataan</p> </td> </tr> </table>	<p>PTL 3 Desember 2021 ditindaklanjuti dengan akan diperhatikan dalam penyusunan dokumen perencanaan selanjutnya. (1)</p>	09	TS	<p>belum dilengkapi surat pernyataan</p>	Rekomendasi kami perhatikan.
<p>PTL 3 Desember 2021 ditindaklanjuti dengan akan diperhatikan dalam penyusunan dokumen perencanaan selanjutnya. (1)</p>	09	TS	<p>belum dilengkapi surat pernyataan</p>			
6	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="630 948 917 1268"> <p>PTL 3 Desember 2021 ditindaklanjuti dengan telah dipenuhi melalui dokumen RPKMD dengan RPKMD dengan</p> </td> <td data-bbox="630 1071 917 1145">09</td> <td data-bbox="630 1145 917 1219">TS</td> <td data-bbox="630 1219 917 2303"> <p>agar ditindaklanjuti dengan form perubahan kecurahan RTM/kegiatan RPKMD Kabupaten Lumajang</p> </td> </tr> </table>	<p>PTL 3 Desember 2021 ditindaklanjuti dengan telah dipenuhi melalui dokumen RPKMD dengan RPKMD dengan</p>	09	TS	<p>agar ditindaklanjuti dengan form perubahan kecurahan RTM/kegiatan RPKMD Kabupaten Lumajang</p>	Rekomendasi kami perhatikan.
<p>PTL 3 Desember 2021 ditindaklanjuti dengan telah dipenuhi melalui dokumen RPKMD dengan RPKMD dengan</p>	09	TS	<p>agar ditindaklanjuti dengan form perubahan kecurahan RTM/kegiatan RPKMD Kabupaten Lumajang</p>			
7	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1061 948 1444 1268"> <p>PTL 3 Desember 2021 ditindaklanjuti dengan telah dipenuhi dan ditindaklanjuti dalam dokumen perubahan rencana jangka menengah pembangunan daerah Kabupaten Lumajang 2023 - (1)</p> </td> <td data-bbox="1061 1071 1444 1145">09</td> <td data-bbox="1061 1145 1444 1219">TS</td> <td data-bbox="1061 1219 1444 2303"></td> </tr> </table>	<p>PTL 3 Desember 2021 ditindaklanjuti dengan telah dipenuhi dan ditindaklanjuti dalam dokumen perubahan rencana jangka menengah pembangunan daerah Kabupaten Lumajang 2023 - (1)</p>	09	TS		Tindak lanjut telah selesai.
<p>PTL 3 Desember 2021 ditindaklanjuti dengan telah dipenuhi dan ditindaklanjuti dalam dokumen perubahan rencana jangka menengah pembangunan daerah Kabupaten Lumajang 2023 - (1)</p>	09	TS				

8

<p>Substansi Rancangan Abstrak P-SP JMD tahun 2018-2023</p>	<p>1.04</p>	<p>The Program P-SP JMD Kabupaten Limapuluh Tahun 2018-2023 agar mencapai kembali dan perbaikan perubahan yang dibutuhkan untuk menjamin stabilitas rancangan abstrak P-SP JMD Kabupaten Limapuluh tahun 2018-2023 telah berhasil dan memertahabai OPO terbaik untuk medukung rewi rancangan renstra perampat terbaik sesuai kebutuhan sehingga menyilkan informasi yang berkualitas dan sesuai ketentuan : a. Klarifikasi tujuan, sasaran dan indikator; b. Kualitas indikator kinerja; c. Keserasan dengan rancangan renstra OPO; d. Keterkaitan antara isu strategis dan strategi serta keselarasan/konsistensi antar SAM dalam dokumen P-SP JMD</p>	<p>08</p>	<p>- 0</p>	<p>09</p>	<p>BT</p>
-------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	------------	-----------	-----------

Kami akan memperhatikan rekomendasi dengan baik.

9

**REKAPITULASI TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN**

Periode Pelaporan Triwulan ke-1: 27 July 2021 & 27 July 2022

Nomor LSP & Tanggal	Temuan	Kode	Rekomendasi	Kode	Terindaklanjuti	Kode	Mrl.
700/41/427.3/2022 09 Juni 2022 LHM nra Rancangan Abstrak RPSP TA 2023	<p>1. Hasil Pengujian atas kesesuaian rancangan abstrak RPSP dengan Peraturan Daerah RP JMD. a. Kelengkapan Dokumen b. Kemudahan pencapaian target kinerja sasaran dan program dalam rancangan abstrak RPSP dengan hubung RP JMD c. Kesesuaian Rencana dan prioritas pembangunan SAM IV Rancangan Abstrak RPSP dengan sasaran pada SAM V dan SAM VI, serta keterkaitan dan program pembangunan SAM IV RP JMD d. Kesesuaian indikator dan target kinerja SAM IV Rancangan Abstrak RPSP dengan SAM VII dan VIII serta keterkaitan dengan indikator dan target kinerja RP JMD dan RPSP e. Kesesuaian program dan kegiatan yang ada dalam rancangan abstrak RPSP dengan klasifikasi, kedelapan dan rekomendasi perencanaan pembangunan dan kerangka daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. f. Kesesuaian perencanaan indikator program dan kegiatan serta target dalam rancangan abstrak RPSP dengan kebijakan subsektor dalam Rencana Renstran Menteri terkait terkait yang mengatur mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) g. Kesesuaian rancangan abstrak RPSP yang dibuat telah memperhatikan Perundang-undangan nasional Peraturan RPSP Tahun 2023. 2. Hasil pengujian atas kesesuaian substansi ntra SAM pada rancangan abstrak RPSP Nmeria program RPSP dan RP JMD. h. Kesesuaian arah kebijakan serta program prioritas SAM V Rancangan RPSP dan abstrak saat ini terdapat Perencanaan Pembangunan</p>	1.04	<p>1.04 1. Lebih cermat dan mendalam proses penyusunan RPSP sesuai ketentuan terdapat 2. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi kembali dalam penyusunan RPSP untuk sesuai dengan ketentuan terdapat. 3. Meninjau dokumen ke-1. 4. Melakukan kajian/audit penyusunan RPSP dengan disertai bukti yang memadai dan realistik untuk/Agenda Penyusunan sesuai ketentuan terdapat 5. memantapkan penyajian data pada RPSP lebih akurat terkait permasalahan yang menjadi isu strategis dan pencapaian target-program/kegiatan terdapat data PPK, KDB, SPK dan IK. 3. Segera melakukan pemutakhiran dan pengurangan program/kegiatan/sub-kegiatan sesuai prioritas yang terdapat dalam pada dokumen RP JMD dan RPSP sesuai dengan ketentuan terdapat yang Penyusunan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-0885 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Perencanaan Klasifikasi, Substansi dan Indikator Kinerja - (R)</p>	- 0			

Kami akan memperhatikan rekomendasi dengan baik.

III BIDANG PSIK

1

Pencairan dana menjadi tupoksi dari BPKD dan Dinas PU sebagai pelaksana.

Periode Pelaksanaan: 01 Januari 2015 & 29 July 2012

REKAPITULASI TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN

Nomor LUP & Tanggal	Temuan	Kode Rekomendasi	Kode Tindakan/jic	Kode Status Kiri
700/61/427.3/2012 21 May 2012 UBR atas Surat Pencarian Perijinan Tetap Kritis dalam rangka PPN untuk kegiatan yang dipaparkan perijinan jenis PT. OMI tahun 2012	<p>A. Diambilnya Salinan pengumpulan kembali Pencarian Dana</p> <p>B. Sifat dari setiap laporan kemajuan dana dan setiap progress perubahan kegiatan serta laporan atas rencana kebutuhan dana yang diperlukan untuk memperlakukan pekerjaan serta laporan perhitungan nilai perijinan yang tidak akan dicairkan atau hasil perhitungan pengapabelan setiap kegiatan terkait proyek Penulisan Elemen Nominasi PPN</p>	3.03	- 0	06 BT
		1.24	- 0	06 BT
			- 0	06 BT
			- 0	05 BT

			- 0	06 BT
			- 0	06 BT

			- 0	06 BT
			- 0	06 BT



Lampiran 2 :  
KAK PEN

Nomor LUP & Tanggal	Temuan	Node	Subtema/Node	Kode	Therdampak	Kode	Status	MS.
700/07/427/3/2022/09 February 2022 LUP atas Perubahan KAK yang diusulkan dalam rangka perubahan perjanjian pinjaman daerah dalam pelaksanaan PDI	A. Efektivitas sistem pengendalian intern persiapan perubahan KAK	3.03	<p>1. Lebih lanjut direkomendasikan kepada Kepala BAPPEDA, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan dir. pihak renehan biaya terkait perubahan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) program dalam rangka PDI untuk meninjau kembali pengendalian dan upg : 1. Meninjau kembali sistem dan persiapan pengendalian intern perubahan Kerangka Acuan Kegiatan yang diusulkan dalam rangka perubahan perjanjian pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan PT. Sarana Multi Industri/valas (PT. SM I) Tahun Anggaran 2022, diantaranya dengan: a. Melakukan penyesuaian perubahan KAK dengan SOP dan bukti verifikasi secara manual sebagai format KAK sesuai ketentuan; - (0)</p> <p>b. Melakukan pengendalian / verifikasi untuk memastikan bahwa kegiatan yang diajukan dan proyek yang diusulkan telah sesuai dengan prioritas daerah, baik dalam dan rencana/program kerja penangan COVID-19 khususnya untuk penanganan dampak ekonomi; - (0)</p>	- 0	06	BT		
	B. Substansi Perubahan Kerangka Acuan Kegiatan terkait pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	2.02	<p>2. Melakukan KAK dengan aspek perubahan secara informatif dan alihuruf dengan pertimbangan yang tepat berdasarkan bukti pendukung yang memadai; - (0)</p>	- 0	06	BT		
			<p>3. Menyajikan informasi terkait jadwal paket pekerjaan sebelum perubahan dan setelah perubahan dalam narasi pada KAK secara jelas berdasarkan bukti pendukung yang memadai; - (0)</p> <p>4. Mempertimbangkan untuk melakukan tidak yang harus diperhatikan diawasi/nya menyebabkan timbulnya belenggu/nya dan pinjaman tersebut sesuai ketentuan bahwa proyek telah tepat tepat waktu, tepat kualitas, tepat manfaat, tepat jumlah, tepat lokasi; - (0)</p>	- 0	06	BT		

- A.
1. KAK PEN sebagaimana terlampir;
  - a. BAPPEDA akan melakukan pengendalian/verifikasi untuk memastikan bahwa kegiatan yang diajukan dan proyek yang diusulkan telah selaras dengan prioritas daerah, kajian dan rencana program kerja penanganan COVID-19 khususnya untuk penanganan dampak ekonomi;
  2. KAK PEN terlampir;
  3. KAK PEN terlampir;
  4. Kelengkapan usulan pinjaman tersebut memperhatikan ketentuan tersebut dengan PT SMI.

Lumajang, 24 Maret 2023



Keterangan :  
 TS = Tindak lanjut selesai  
 TB = Tidak lanjut sudah, namun masih ada yg kurang  
 BT = Belum tindak lanjut sama sekali  
 TT = Tidak dapat ditindaklanjuti